

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menghadapi permasalahan kesehatan di Indonesia seperti rendahnya akses pelayanan kesehatan yang membuat permasalahan kesehatan menjadi tidak efektif dalam pelayanannya. Pemerintah berusaha untuk mensejahterakan kesehatan di Indonesia agar masyarakat kurang mampu bisa mendapatkan hak dalam kesejahteraan sosial yang menyangkut kesehatan masyarakatnya. Kesehatan merupakan bagian terpenting dan modal terbesar untuk mencapai kesejahteraan, maka dari itu pembangunan dan perbaikan pelayanan kesehatan merupakan investasi sumber daya manusia untuk mencapai masyarakat yang sejahtera.

Pembangunan dibidang kesehatan di Indonesia memiliki tujuan yaitu mencapai masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mewujudkan keadaan yang sehat baik secara jasmani dan rohani. Pemerintah saat ini berupaya membangun pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau dan dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan masyarakat baik dari kalangan bawah sampai kalangan atas, tanpa membedakan status sosial ekonominya untuk memperoleh pelayanan kesehatan secara adil dan merata (Depkes RI, 2008).

Pelayanan kesehatan merupakan hak dasar bagi masyarakat Indonesia dimana seluruh pelayanan yang dibutuhkan masyarakat harus disediakan dan dijamin oleh pemerintah Indonesia seperti yang tercantum dalam UUD 1945 Perubahan, Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah menjalankan UUD 1945 tersebut dengan mengeluarkan UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) untuk memberikan jaminan sosial menyeluruh bagi setiap orang dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat pertama Milik Pemerintah. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) merupakan fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan. Pelayanan kesehatan ini bersifat non spesialisik seperti untuk observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan pelayanan kesehatan yang lain.

Dinas Kesehatan Kota Bogor merupakan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) penyelenggara pelayanan publik pada pemerintah Kota Bogor yang memiliki tanggungjawab di bidang kesehatan pada Pemerintahan Kota Bogor. Untuk mensejahterakan kesehatan masyarakat Kota Bogor Dinas Kesehatan berkerjasama dengan BPJS kesehatan untuk mensukseskan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Bogor. Dinas kesehatan mengawasi FKTP seperti Puskesmas untuk menganggarkan, melaksanakan, menatausahakan dan juga mempertanggungjawabkan dana kapitasi JKN yang akan di serahkan kepada pemerintah Kota Bogor. Dana kapitasi merupakan besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP melalui SKPD Pemerintah yaitu Dinas Kesehatan Kota Bogor berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar dan dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara Dana Kapitasi JKN FKTP.



1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada laporan tugas akhir yaitu, sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Dinas Kesehatan Kota Bogor?
2. Apakah Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Kecamatan Kota Bogor sudah Efektif?
3. Bagaimana Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada FKTP Kota Bogor?

1.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai penulis dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di Dinas Kesehatan Kota Bogor adalah:

1. Menguraikan Proses Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Dinas Kesehatan Kota Bogor.
2. Menguraikan Analisis Epektifitas dalam Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada FKTP Kecamatan Kota Bogor.
3. Menguraikan Pemanfaatan Data Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada FKTP Kota Bogor.

1.4 Manfaat

Dalam sebuah penelitian diharapkan akan menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan oleh penulis atau orang lain. Adapun manfaat yang diinginkan yaitu :

1. Bagi Penulis
Manfaat penulisan tugas akhir ini yaitu untuk mengetahui pengelolaan dana kapitasi JKN di Kota Bogor. Selain itu menambah ilmu dan pengalaman baru yang belum didapat selama menjadi mahasiswa.
2. Bagi Instansi
Laporan tugas akhir ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan instansi di masa yang akan datang dan menjadi masukan untuk membantu kelancaran perusahaan, khususnya pada pengelolaan dana kapitasi JKN.
3. Bagi Pembaca
Laporan tugas akhir ini dapat dimanfaatkan sebagai penambah pengetahuan dan pemahaman tentang pengelolaan dana kapitasi JKN, juga dapat dijadikan bahan referensi penelitian bagi mahasiswa selanjutnya.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies